



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CISKANINGTYAS HERTANTRI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 260411

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 23.467.000.000

1. Bangunan Seluas 44 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 521 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 4.689.000.000
3. Bangunan Seluas 23.68 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 839 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 7.551.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1103 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 9.927.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.197.993.179

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 24.689.993.179

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 24.689.993.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.